

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Di Indonesia, telah banyak dilakukan pengembangan dibidang sektor pertanian guna untuk meningkatkan pendapatan petani dan pembangunan nasional. Namun yang saat ini terjadi di Indonesia adalah munculnya masalah-masalah pertanian. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani di daerah pedesaan antara lain kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi, serta lemahnya tingkat organisasi petani. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan Program Jangka Menengah (2005-2009) yaitu melalui pendekatan mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat lembaga pertanian di pedesaan (Departemen Pertanian, 2008).

Masalah permodalan merupakan masalah yang sering terjadi dikalangan petani kecil. Sulitnya sistem administrasi dalam meminjam modal dari lembaga formal (perbankan) merupakan salah satu penyebab dari masalah ini. Untuk mendapatkan modal atau kredit dari lembaga tersebut, masyarakat langsung dihadapkan pada persyaratan formal administrasi. Persyaratan formal administrasi ini antara lain adanya persyaratan jaminan atau agunan (*collateral*). Persyaratan yang demikian pada umumnya tidak atau belum dimiliki oleh pengusaha kecil. Pada umumnya aset yang mereka miliki terutama aset fisik seperti tanah, rumah dan lain sebagainya, belum memiliki sertifikat (formal). Sebagian dari mereka tidak memiliki aset fisik yang bisa disertifikatkan, dan walaupun ada nilainya sangat kecil. Hal lainnya yang memberatkan adalah mekanisme perbankan yang menurut penduduk pedesaan menyulitkan, sangat birokratis dan biaya transaksinya mahal. Sementara bagi lembaga keuangan formal sendiri hampir tidak masuk akal melakukan transaksi dengan skala mikro karena jelas akan menyebabkan tingginya biaya transaksi dan transaksi dengan sektor usaha yang penuh resiko tidak bisa dibenarkan. Selain itu, adakalanya lembaga-lembaga tersebut hanya memberikan kesempatan meminjam pada waktu-waktu tertentu. Hal inilah yang menyebabkan sebagian petani kecil lebih tertarik untuk meminjam

modal kepada tengkulak. Dengan permasalahan-permasalahan seperti itu, maka pemerintah mencanangkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang merupakan fasilitas pemerintah dalam rangka memberdayakan atau meningkatkan partisipasi masyarakat di pedesaan untuk mencapai tujuan yaitu : a) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah, b) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani, c) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, d) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan (Departemen Pertanian, 2008).

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah Lembaga Keuangan Mikro yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh petani/masyarakat tani di pedesaan guna memecahkan masalah/kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan untuk membiayai usaha agribisnis. LKM-A merupakan Gapoktan penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP yang dibina dan ditumbuhkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai salah satu unit usaha dalam Gapoktan. Teknis operasional LKM-A yang menggunakan “*unit banking system*” yaitu *skim* kredit menyesuaikan kebutuhan petani atau nasabah (besaran kredit, proses pendapatan kredit lebih mudah, waktu pengembalian yang fleksibel, dll). Hal ini dianggap lebih cocok untuk petani dan usaha kecil (Departemen Pertanian, 2005).

Prastowo (1995) *cit* Alza (2011), mengemukakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang bisa dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut. Kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu tingkat atau level yang mencerminkan baik atau buruknya suatu perusahaan ditinjau dari segi bisnis.

Menurut Riyanto (1993) hasil dari penilaian kinerja keuangan yang berdasarkan data dan informasi keuangan dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan perusahaan. Penentuan tingkat kesehatan ini penting sebagai faktor pendorong bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas

perusahaan. Analisis kinerja LKM-A dalam fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro penting untuk dilakukan untuk melihat perkembangan dari LKM-A tersebut.

Pengukuran manajemen pengelolaan LKM-A dilakukan untuk beberapa pertimbangan yaitu : (1) Mengukur tingkat keberhasilan dari proses pendampingan terkait dengan pengelolaan keuangan. Proses pendampingan ini secara nyata ditunjukkan adanya peningkatan kemampuan pengurus gapoktan dalam mengelola keuangan. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan didasarkan pada AD/ART dan standar manajemen keuangan yang telah ditetapkan; (2) Mengukur proses pencatatan dan pelaporan keuangan, untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan. Masalah yang sering terjadi pada LKM di Indonesia adalah kebanyakan LKM seperti LKM milik pemerintah, LKM proyek, maupun LKM-LSM menghadapi persoalan mengenai keberlanjutan aktivitasnya. Ketidakmampuan menjaga keberlanjutan tersebut dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor utama seperti : (1) Ketergantungan terhadap dukungan, baik dari pemerintah ataupun donor; (2) Hanya merupakan proyek yang didesain untuk sementara waktu, (3) Ketiadaan sistem keuangan mikro yang memadai, dan (4) Ketidakmampuan beradaptasi dengan situasi pasar keuangan mikro yang ada. Menghadapi masalah ini, maka perlu diingat bahwa aktifitas keuangan mikro hanya akan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) dan rakyat miskin manakala pelayanan keuangan mikro yang diberikannya dapat berlanjut (Ismawan, 2003).

B. Perumusan Masalah

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pemberian dana bantuan penguatan modal dalam bentuk bantuan Langsung Masyarakat (BLM-PUAP) yang selanjutnya disebut sebagai dana PUAP. Sebagai sebuah negara agraris, keberadaan program PUAP yang dikhususkan bagi masyarakat pertanian diharapkan dapat meningkatkan kinerja sektor pertanian dalam hal peningkatan kualitas sumberdaya manusia maupun produk-produk yang dihasilkan. Program ini terkait erat dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang berdiri dibawah koordinasi Kantor Menteri Perekonomian

dan Kesejahteraan Rakyat. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meringankan kemiskinan dan pengangguran di pedesaan melalui pertumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah (Departemen Pertanian 2008).

Mekanisme PUAP yang telah dirancang oleh Departemen Pertanian cukup mudah. Para petani yang ingin mendapatkan dana PUAP wajib untuk bergabung dalam kelompok tani (Poktan) yang terorganisir dalam suatu gabungan kelompok tani (Gapoktan). Setelah itu, setiap gapoktan dengan bantuan para penyuluh harus membuat Rencana Usaha Bersama (RUB) dan melengkapi seluruh dokumen administrasi yang dibutuhkan. Apabila telah adanya verifikasi dokumen, maka pencairan dana PUAP dapat diurus oleh kerjasama antara gapoktan dan penyuluh pendamping. Dana tersebut berjumlah Rp 100 juta dan keterangan penggunaan serta pengguliran dana harus dilaporkan melalui penyuluh pendamping masing-masing gapoktan yang akan diteruskan kepada pemerintah dinas terkait. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan dana PUAP sebagai penguatan modal dan dana awal untuk penumbuhan LKM-A pada Gapoktan di 204 nagari. LKM-A diharapkan menjadi produktif dan efektif sehingga dapat berkembang menjadi lembaga keuangan yang profesional dengan didampingi oleh penyelia mitra tani (PMT) dan penyuluh pendamping (Departemen Pertanian. 2008).

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Saiyo Sakato merupakan unit usaha dari Gapoktan Saiyo Sakato dimana manajemen pengelolaan dipilih langsung oleh Gapoktan Saiyo sakato dalam menjalankan operasional simpan pinjam. Lembaga keuangan mikro berupa LKM-A ini merupakan jenis lembaga keuangan yang ditujukan untuk melayani kebutuhan permodalan usaha kecil khususnya bagi usaha agribisnis. Terbentuknya LKM-A diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah permodalan yang pada umumnya dihadapi oleh petani, sehingga Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi masalah permodalan bagi petani pedesaan.

LKM-A yang didirikan semenjak tahun 2013 ini didampingi seorang PMT dan penyuluh pendamping dalam memaksimalkan operasional kegiatan simpan pinjamnya. Sebagai acuan dan pedoman bagi LKM-A dalam menjalankan fungsi dan usaha-usahanya maka dibentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta penyiapan administrasi untuk peminjaman dan pengembalian, seperti slip peminjaman, slip setoran, surat perjanjian dan lain-lain. LKM-A Saiyo Sakato merupakan salah satu dari 51 LKM-A di Kota Padang yang terpilih untuk dijadikan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi dengan biaya yang dibiayai oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan nilai persentase *Non Performing Loan* (NPL)nya yang rendah. Terlihat pada tahun 2014 dan 2016 tingkat NPL yang dimiliki oleh LKM-A ini sebesar 0%, namun mengalami kenaikan sebesar 2,67% pada tahun 2015 (Lampiran 3). Peningkatan NPL ini belum bisa memberikan gambaran mengenai manajemen keuangan pada LKM-A ini sehingga hal ini dijadikan sebagai acuan bagi peneliti terkait manajemen keuangan pada LKM-A Saiyo Sakato.

Sebagai lembaga yang berfungsi dalam mengelola dan menyalurkan dana PUAP dari pemerintah kepada anggota (petani) yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti meningkatnya pendapatan sehingga masyarakat bisa mengembalikan modal berupa pinjaman dari dana PUAP tersebut untuk digulirkan kembali kepada masyarakat lainnya, LKM-A Saiyo Sakato harus tetap berjalan dan dapat meningkatkan kinerjanya, baik dari kinerja keuangan, dan pelayanan terhadap konsumen organisasi (nasabah). Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja LKM-A Saiyo Sakato dengan metode yang tepat untuk mengetahui sampai sejauh mana kinerja LKM-A Saiyo Sakato tersebut. Evaluasi kinerja harus dilakukan agar mampu memberikan informasi/data tentang kinerja organisasi LKM-A Saiyo Sakato dan untuk mengetahui pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam tujuan organisasi tersebut. Evaluasi kinerja suatu organisasi/perusahaan dapat diukur menggunakan beberapa metode. Salah satu indikator yang dapat membantu mengukur evaluasi kinerja organisasi adalah dilihat dari aspek kinerja keuangan (finansial) LKM-A Saiyo Sakato.

Dengan melakukan pengukuran kinerja maka dapat diketahui apakah proses yang terjadi didalam aktivitas LKM-A sudah dapat menempatkan LKM-A Saiyo Sakato menjadi lembaga keuangan yang mampu menyalurkan bantuan modal kepada petani. Secara umum LKM-A ini mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan LKM lainnya yaitu membantu program pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.

Dari awal beroperasi LKM-A ini hanya membuat laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan laba/rugi. Dilihat dari neraca LKM-A Saiyo Sakato dari tahun 2014 sampai 2017 (Lampiran 5), terlihat persentase modal yang meningkat pada LKM-A ini. Pada tahun 2014 LKM-A ini memiliki modal sebesar 22% dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 24%. Begitupun pada tahun 2016 dan 2017 modal LKM-A Saiyo Sakato mengalami peningkatan menjadi 25% dan 29%. Peningkatan persentase modal yang tidak terlalu besar ini belum bisa memberikan gambaran keadaan kinerja keuangan pada LKM-A ini karena modal merupakan salah satu prinsip dalam mengukur perkreditan yang sehat selain prinsip karakter, kapasitas, jaminan, kondisi perekonomian serta kendala. Oleh karena itu diperlukan evaluasi kinerja keuangan pada LKM-A Saiyo Sakato untuk memberikan informasi mengenai kinerja keuangan yang dilihat dari aktivitas pada LKM-A ini. Berdasarkan hal diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Saiyo Sakato Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang”.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan manajemen LKM-A Saiyo Sakato
2. Menganalisis kinerja keuangan LKM-A Saiyo Sakato.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya :

1. Bagi LKM-A, sebagai bahan masukan perbaikan terhadap perkembangan LKM-A.
2. LKM-A lainnya, sebagai acuan atau panutan agar dapat menjadi lembaga keuangan mikro yang lebih baik lagi.
3. Masyarakat, sebagai informasi mengenai LKM-A dan kinerja LKM-A.
4. Bagi peneliti diharapkan dapat mempertajam kemampuan menganalisis permasalahan yang ada di kehidupan nyata sesuai dengan materi yang telah didapatkan diperkuliahan.

